

Tinjauan Studi

Kebijakan Terkait Migrasi dan Pola Migrasi¹

Deni Mukbar²

Mobilitas penduduk menuju perkotaan di Indonesia meningkat sangat tajam. Salah satu indikator yang membuktikan hal itu adalah angka pertumbuhan penduduk kota yang sangat tinggi. Migrasi masuk ke kota sangat erat kaitannya dengan kebijakan pembangunan yang bersifat bias kota (*urban bias*), perkotaan menjadi pusat dari berbagai kegiatan pembangunan, mulai dari perdagangan, industri sampai dengan administrasi dan pembangunan politik (Todaro 1976 dan Hugo 1979, dalam Romdiati & Noveria 2004:3). Hal ini menyebabkan kota besar, seperti Jakarta, tidak terhindarkan lagi menjadi daya tarik yang kuat bagi penduduk dari daerah-daerah lain. Perkotaan menyediakan kesempatan kerja dan usaha ekonomi di berbagai bidang, sementara di daerah asal mereka menghadapi keterbatasan kesempatan ekonomi. Artinya, perpindahan penduduk terjadi akibat tingginya upah yang dapat diperoleh di daerah tujuan. Kondisi nyata pendatang menuju perkotaan terlihat paska perayaan Idul Fitri. Kaum migran yang kembali dari kampung halamannya beberapa diantaranya malah membawa serta kerabatnya menuju kota.

Di samping itu, ketersediaan sarana dan prasarana sosial, seperti pendidikan, di kota ini juga menjadikan penduduk usia sekolah untuk datang dan bertempat tinggal di perkotaan. dalam konteks tersebut, Tjiptoherijanto (2000, mengutip Kunz 1973; Rusell 1966) menjelaskan, baik secara konseptual maupun metodologi, sampai saat ini para ahli masih kesulitan membedakan secara lebih tajam proses migrasi berlatar belakang ekonomi maupun non-ekonomi.

I. Kebijakan Terkait Migrasi

a. Kebijakan Kota Tertutup

Mobilitas para migran (baik permanen maupun non-permanen) yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali di kota-kota besar berindikasi memunculkan dampak positif maupun negatif. Dari sisi pelaku migrasi, mobilitas ke kota relatif berdampak positif karena dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dibanding dengan penghasilan di desa asal. Di sisi lain, maraknya migrasi menuju perkotaan berdampak negatif karena secara langsung atau tidak, kota besar membutuhkan peningkatan kualitas dan

¹ Tulisan ini merupakan tinjauan pustaka untuk penyusunan Profil penelitian From Rural to Global Labor: Transnational Migration and Agrarian Change in Indonesia and the Philippines yang dilakukan Yayasan AKATIGA Bandung dan Department of Geography University of the Philippines, tahun 2009.

² Peneliti Yayasan AKATIGA.

kuantitas fasilitas sosial, lingkungan, keindahan dan ketertiban (Bandiyono, 2004:3, dalam Romdiati & Noveria 2004; Supriyatna 2008). Pelaku migrasi ke kota (utamanya kelompok pendatang dengan kualitas rendah) menimbulkan berbagai masalah, antara lain berkembangnya kawasan permukiman kumuh, degradasi lingkungan, kerawanan sosial, tindak kriminal dan permasalahan pengangguran serta kemiskinan.

Berdasarkan fenomena tersebut, banyak pemerintahan di perkotaan yang menjalankan kebijakan untuk “menjaga” kotanya dari serbuan pendatang. Pemerintahan kota-kota besar di Indonesia memberlakukan kebijakan “kota tertutup”, yaitu larangan bagi penduduk (khususnya penduduk pendatang) yang tidak memiliki KTP atau pekerjaan tetap untuk tinggal di kota yang dituju. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah lokal agar para pendatang yang tidak memiliki modal atau peluang kerja di perkotaan tidak lantas menumpuk di kota-kota besar. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya untuk menekan kedatangan para migran dari perdesaan atau luar kota. Untuk menegaskan kebijakan tersebut, operasi yustisi kerap dilakukan pemerintah kota-kota besar dengan melakukan razia kartu tanda penduduk (KTP). Warga yang tidak memiliki KTP ataupun surat keterangan tinggal dari RT/RW setempat, serta tidak memiliki bukti telah memiliki pekerjaan, akan ‘dipulangkan’ ke daerah asalnya (Palupi 2004; Widyaningrum 2009).

b. Dampak Kebijakan Kota Tertutup

Kebijakan pemerintah lokal maupun nasional mengenai “kota tertutup”, sebagai upaya untuk melarang penduduk termasuk dari perdesaan untuk datang ke suatu kota merupakan upaya yang cenderung kurang efektif dilakukan. Salah satu bukti yang dapat ditinjau adalah tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan kota tertutup oleh pemerintah Kota Jakarta pada tahun 1970-an, semasa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin (Supriyatna 2008). Pelaksanaan kebijakan “kota tertutup” dianggap kurang efektif karena anggapan bahwa melarang kedatangan seseorang ke suatu tempat merupakan pelanggaran hak azasi manusia. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Salah satunya adalah melalui pembangunan daerah perdesaan, termasuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi perdesaan yang dapat berperan untuk mencegah aliran mobilitas penduduk desa ke perkotaan. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi migrasi penduduk ke kota besar adalah penyediaan sarana transportasi yang terjangkau namun nyaman yang menghubungkan kota-kota kecil dengan kota besar yang berperan sebagai pusat ekonomi. Ketersediaan transportasi memungkinkan migran untuk tinggal di kota kecil, sementara aktivitas ekonomi dilakukan di kota besar (Anonim 2009; Noveria 2009).

II. Pola dan Proses Migrasi di Indonesia – Tinjauan Umum

Tenaga kerja migran dimaknai sebagai orang-orang yang berpindah dari suatu tempat (desa) ke tempat lain (kota) yang bertujuan untuk mencari pekerjaan. Tenaga kerja migran meliputi banyak tipe, mulai dari tidak memiliki keahlian, setengah keahlian, hingga berkeahlian. (ILO, t.th:3-4).

Kajian secara sosiologis menunjukkan bahwa migrasi desa-kota tidak sekedar gerak terkait melewati lintas batas geografi. Hal lebih mendasar, gerak ini merupakan wahana melintasi batas-batas budaya agraris-tradisional dengan budaya industrial-modern. Migran berasal dari desa, sebagai wilayah yang menunjukkan wujud kesatuan atas dasar tinggal dekat dan atas dasar keturunan masih dijunjung tinggi. Kehidupan sosial dan ekonomi bertumpang tindih dalam tindakan kolektif karena adanya saling ketergantungan ekologi maupun proses-proses biologi dalam memproduksi (Hayami dan Kikuchi, 1987; Kutaneegara 2002:1-2). Interaksi antar tetangga rumah, tetangga dusun dan tetangga desa berlangsung dengan berhadapan muka dan bersifat mendalam. Waktu senggang yang digunakan untuk membangun hubungan silaturahmi dan bercengkerama dengan masyarakatnya cukup besar dan dipandang sebagai kebutuhan mendasar.

Para kaum migran yang datang ke kota tidak serta merta melupakan konsep nilai-nilai agraris tradisional yang dimiliki. Alih-alih melupakan, muncullah “pertentangan” dalam diri kaum migran, antara ikatan emosional dalam desa yang kuat berhadapan dengan kondisi kota yang cenderung menunjukkan tingkat interaksi antar warga relatif longgar. Pekerja terpisah dari hasil kerja maupun dari alat-alat produksinya. Pekerja industri dituntut bersifat efisien, rajin, teratur, tepat waktu, sederhana, dan rasional dalam memutuskan tindakan (Myrdal, 1972 dalam Tarigan, 2004). Sebagian besar indikator produksi dan status dinilai dengan uang.

Perubahan tempat bekerja dari desa ke kota atau dari agraris ke industri yang memiliki kebiasaan, simbol-simbol, nilai dan norma yang berbeda, mensyaratkan adanya proses adaptasi yang meliputi seluruh tindakan sosial-ekonomi-budaya seorang migran. Optimalisasi prestasi dan produksi dalam bekerja sangat ditentukan kemampuan migran dalam beradaptasi.

Salah satu faktor yang mendorong terjadinya migrasi adalah adanya jaringan sosial. Kehadiran para migran yang pulang secara periodik, membawa cerita, gaya dan penampilan yang disimbolkan sebagai identitas warga kota yang maju dan modern. Simbol-simbol itu dinilai sebagai indikator kemajuan status ekonomi maupun sosial di masyarakat. Disadari atau tidak, gambaran mengenai perkembangan di perkotaan pun mendorong warga lain untuk bermigrasi ke kota. Pada titik ini keberadaan jaringan sosial cenderung menguat. Para migran terdahulu bisa menjadi titik pembentuk jaringan sosial yang memperkuat psikologis warga desa lain untuk bermigrasi. Di sisi lain, Thieme (2006:10-11) menunjukkan bahwa penelitian hubungan

sosial bermanfaat untuk mengetahui cara-cara dan alasan masing-masing individu memperoleh akses terhadap sumber modal, hingga memanfaatkannya untuk kepentingan migrasi.

Pada masyarakat Jawa, berdasarkan beberapa tulisan klasik kebudayaan Jawa, banyak ahli berpendapat bahwa masyarakat pedesaan Jawa hidup dalam keharmonisan dan penuh dengan kegiatan tolong menolong. Seakan kembali dalam nuansa romantisme pedesaan, Koentjaraningrat (1974, dalam Kutaneegara 2002:2) menjelaskan bahwa hubungan resiprositas sangat kuat di pedesaan Jawa. Di daerah pedesaan Jawa, suatu rumah tangga pertama-tama harus menjaga hubungan yang baik dengan tetangga sekitarnya, kemudian dengan keluarga-keluarga lain sedukuh dan baru kemudian dengan keluarga lain yang tinggal di dukuh-dukuh lain. Penekanan hubungan baik dengan tetangga yang harus dipupuk pertama kali menandakan bahwa peran dan fungsi tetangga sangat penting bagi masyarakat pedesaan. Jaringan hubungan baik itu bahkan harus mengalahkan hubungan baik dengan kerabat yang berada di tempat yang lebih jauh. Sebagai wujud hubungan baik mereka nyatakan dengan berbagai cara bergotong royong dan tolong menolong misalnya mengundang dan mengirimkan makanan apabila mengadakan slametan, membawakan oleh-oleh kalau bepergian jauh, dan melakukan sambat sinambat untuk pekerjaan-pekerjaan di sekitar rumah dan pertanian. Selain itu, mereka juga melakukan kegiatan *tetulang* layat ketika mereka mengalami musibah kematian dan sakit.

Berdasarkan pemaparan diatas, proses migrasi tenaga kerja tidak serta merta dilakukan. Mereka umumnya memperhitungkan terlebih dahulu peluang dan kesempatan kerja di tempat tujuan. Salah satu bentuk jaminan yang mereka pergunakan adalah pemanfaatan jaringan sosial (*social net*). Proses terjadinya jaringan sosial kerap melibatkan modal sosial (*social capital*)³ yang dimiliki masyarakat. Sisi manfaat ekonomis modal sosial akan terlihat apabila mampu membantu individu atau kelompok untuk mengakses sumber-sumber keuangan, informasi, menemukan pekerjaan, merintis usaha dan meminimalkan biaya transaksi (Tonkiss 2000, dalam Syahyuti 2008:33). Secara singkat, modal sosial dapat berperan sebagai perekat yang mengikat semua orang dalam masyarakat. Agar modal sosial tumbuh dan berkembang dengan baik dibutuhkan “nilai saling berbagi” (*shared values*) serta pengorganisasian peran (*rules*) yang diekspresikan dalam hubungan personal, kepercayaan, dan common sense tentang tanggung jawab bersama, sehingga masyarakat menjadi lebih dari sekedar kumpulan individu belaka (Coleman 1988; Putnam 1993; World Bank 1998 dalam Syahyuti 2008:33).

Sementara itu, untuk memperjelas konteks studi ini, jaringan sosial dapat dimaknai sebagai jaringan yang bersifat informal dan cenderung digunakan untuk mengatasi berbagai

3 Konsep modal sosial lahir dari kritik terhadap pendekatan individual otonom yang merupakan karakter utama yang dianut ilmuwan ekonomi neo klasik. Semenjak dahulu telah berkembang berbagai pengertian tentang modal sosial, baik yang dikembangkan oleh kalangan ekonomi maupun sosial (ilmu non-ekonomi), sehingga saat ini dapat kita temukan modal sosial dalam pengertian kalangan ekonomi dan non-ekonomi (Syahyuti 2008:32).

kesulitan yang dihadapi di daerah perkotaan. Jaringan sosial juga menjadi "titik masuk" terbesar untuk mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal, sumber pinjaman dan menyimpan uang (pendapatan) yang mereka peroleh di tempat tujuan. Penelusuran mengenai jaringan sosial diharapkan dapat menunjukkan upaya yang dilakukan para tenaga kerja migran dalam mengembangkan dan memelihara hubungan-hubungan sosial dengan sesama migran dengan daerah asal yang sama dan berbasis kekerabatan, ketetanggaan, pertemanan, atau campuran di antara unsur-unsur tersebut.

Hal sama dikemukakan Mulyanto, dkk (2009:281-287) yang menunjukkan buruh migran memilih kerja di luar desanya karena sudah ada "jaminan" akan mendapatkan kerja di kota tujuannya. Ada beberapa model jaringan yang mereka gunakan dalam pencarian kerja. Diantaranya adalah unit pertemanan, pertetanggaan atau melalui agen ketenagakerjaan. Secara singkat model jaringan kerja yang terbentuk dapat dilihat pada bagan berikut ini.

Tabel 1. Jaringan Kerja di Perdesaan

Jaringan Kerja	Keterangan	Jenis Lapangan Kerja
Pertemanan	Jaringan kerja ini menggunakan hubungan antar-teman. Umumnya para pelaku mencari pekerjaan pada temannya. Atau sebaliknya, seseorang mencari pekerja di kalangan temannya sendiri.	Buruh bangunan, buruh industri, sektor jasa (tukang jahit), pedagang
Pertetanggaan	Jaringan kerja ini hampir sama dengan pertemanan. Namun jaringan yang digunakan adalah sesama tetangga dalam desanya.	Buruh bangunan, buruh industri, sektor jasa (tukang jahit), pedagang, pembantu rumahtangga
Agen tenaga kerja	Proses kerja menjadi pekerja migrasi internasional biasanya mengandalkan agen-agen tenaga kerja dari luar daerah yang sering datang ke desa. Kalaupun tidak, beberapa calon TKI sengaja mencari agen-agen yang ada di wilayah masing-masing.	Tenaga kerja internasional

Sudah mejadi hal lumrah para calon tenaga kerja menggunakan jaringan agen penyalur tenaga kerja. Pada beberapa kasus calon tenaga kerja domestic, banyak berdiri yayasan yang menyalurkan tenaga kerja, misalnya adalah yayasan tenaga kerja rumah tangga. Namun, contoh paling jelas terlihat pada proses penyaluran tenaga kerja ke luar negeri (transnasional).

Penempatan dan dan perlindungan TKI paling tidak harus berpedoman kepada 2 (dua) undang-undang yaitu Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya. Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004, Pasal 95 ayat (1), secara tegas menyebutkan bahwa BNP2TKI mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi, lebih lanjut ayat (2) BNP2TKI bertugas: a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan sebagaimana Pasal 11 ayat (1), b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: 1) dokumen; 2) Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); 3) penyelesaian masalah; 4) sumber sumber pembiayaan; 5) pemberangkatan sampai pemulangan; 6) peningkatan kualitas calon TKI; 7) informasi; 8) kualitas pelaksanaan penempatan TKI; dan 9) peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Sah-sah saja meletakkan fungsi BNP2TKI sebagai lembaga penempatan pemerintah semata, jika memperhatikan konstruksi Pasal 95 yang terdiri dari 2 (dua) ayat dan penulisan dalam satu pasal, hal ini karena ada kesamaan materi antara ayat (1) dan ayat (2) dan rangkaian materi yang tidak dapat dipisahkan (Undang Undang Nomor: 10 Tahun 2004, penjelasan dalam angka 50 dan 59) (Naekma & Pageh 2009:2-3). Sedangkan penyalur tenaga kerja Indonesia dari pihak swasta dijalankan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Berdasarkan data BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), hingga saat ini tercatat setidaknya 499 PPTKIS resmi di seluruh Indonesia. Sementara itu, di Kabupaten Subang sendiri tercatat hanya satu PPTKIS, yang berlokasi di Pusakajaya, Subang (BNP2TKI 2007).

III. Pola Relasi Antara Tenaga Kerja Migran dan Rumah Tangga

Proses migrasi yang dilakukan para kaum migran memunculkan berbagai dampak positif maupun negatif, baik bagi para migran sendiri dengan keluarga yang ditinggalkan maupun dengan masyarakat sekitarnya. Sebelum membahas lebih jauh mengenai relasi antara kaum migran dengan rumah tangga yang ditinggalkannya, hal tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah biaya-biaya sosial (*social cost*) yang harus dibayar para pekerja migran selama mereka bekerja pun perlu diperhitungkan. Secara umum, biaya-biaya sosial yang harus dibayar para pekerja migran selama mereka berada di negara tujuan, antara lain seperti; perpisahan sementara dengan keluarga, suami (para TKW) yang mungkin berpaling pada wanita lain, perubahan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, ketegangan dalam keluarga migran, bahkan perceraian dengan suami. Pemahaman tentang dampak negatif migrasi perlu

mendapat perhatian yang cukup (Wirawan 2006:15-16; Deans, *et. al.* 2006:2). Penelitian tentang perempuan migran kembali dari Arab Saudi di Yogyakarta menunjukkan bahwa migran kembali mengalami berbagai persoalan sosial dan psikologi (Sukamdi. *et. al.* 2002). Di negara tujuan mereka memperoleh berbagai perlakuan tidak senonoh. Dalam perjalanan pulang, migran menjadi sasaran perampokan, dan ketika mereka sampai di tempat tujuan, mereka harus menyesuaikan dengan permasalahan adaptasi sosial dan psikologi. Mungkin benar bahwa keuntungan ekonomi yang mereka terima pada dasarnya tidak sebanding dengan pengorbanan-pengorbanan yang harus dilakukan oleh migran.

Kepergian kaum migran sedikit banyak mempengaruhi pola relasi yang terjadi antara para migran dengan keluarganya. Sebelum pergi bermigrasi, relasi dalam keluarga cenderung bersifat patriarkis, pembagian kerja pun terbentuk sangat *sexist*, yaitu kerja rumah tangga yang dilakukan laki-laki relative berbeda dengan tanggung jawab kerja yang harus dilakukan perempuan. Laki-laki, sebagai kepala keluarga, berperan sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan mengurus anak dan rumah tangganya. Kondisi ini pun berimplikasi pada perempuan yang cenderung tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Namun demikian, paska kepulangan menjadi tenaga kerja migran, para perempuan relative membawa nilai-nilai baru dan didukung oleh posisi ekonomi perempuan yang meningkat. Hal ini secara langsung atau tidak mampu meningkatkan posisi tawar perempuan dalam rumah tangganya. Pekerjaan suami mulai terlibat pada sektor domestik, sementara isteri mulai terbuka pada sektor publik karena suami mulai permisif pada nilai-nilai pemingitan. Suami sebagai pencari nafkah utama mulai melibatkan pihak isteri, sementara isteri yang mengurus anak dan rumah tangga mulai dibantu suami sehingga menjadi tanggung jawab bersama. Dalam hal ini pihak isteri mulai independent dalam membuat keputusan sehingga posisinya sebagai sub-ordinat makin kabur dan mengarah pada posisi isteri sebagai mitra. Namun demikian kondisi keluarga potensial mengalami konflik dan yang bersifat manifest, sehingga relatif kurang harmonis.

Secara tegas, Togi (t.th, dalam http://www.depsos.go.id/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=114) menunjukkan perubahan pola relasi gender keluarga migran. Namun perubahan ini masih melihat pada sisi tenaga kerja migran wanita (TKW). Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Perubahan Pola Relasi Gender Keluarga Migran Pasca Migrasi Sebagai TKW

No	Keadaan Pra- TKW	Keadaan Paska- TKW
1.	Pencari nafkah utama adalah suami	Pencari nafkah utama adalah suami dan isteri

2.	Suami meyakini nilai-nilai pemingitan terhadap isteri.	Suami mulai permisif ketika isteri masuk sektor publik.
3.	Isteri fokus terhadap sektor domestik	Suami mulai terbuka pada sektor publik
4.	Isteri tidak independent dalam membuat keputusan	Isteri mulai independent dalam membuat keputusan
5.	Suami tidak terlibat dalam sector domestik	Sebagian suami tejun ke sector domestik
6.	Pembagian kerja sexist dikotomis	Pembagian kerja mulai kabur, tidak sexist dan tidak dikotomis
7.	Posisi isteri sebagai subordinasi sangat kelihatan	Posisi isteri sebagai mitra mulai kelihatan
8.	Pola relasi gender lebih didominasi maskulin dan feminin	Pola relasi gender mengarah pada androgini
9.	Pengasuhan anak tanggung jawab utama isteri	Pengasuhan anak mengarah pada tanggung jawab bersama
10.	Keluarga relatif harmonis	Ada konflik yang bersifat potensial dan manifest

Sumber: http://www.depsos.go.id/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=114

Sementara itu, studi-studi lain menunjukkan perubahan dalam relasi rumah tangga terjadi sebagai dampak anggota rumah tangga yang masuk dalam industrialisasi. Seiring dengan perkembangan industrialisasi, pabrik-pabrik mulai menarik para pekerja untuk meninggalkan rumah-rumah dan desa-desa mereka. Hal ini memisahkan orang dewasa yang sebagian besar waktunya bekerja di pabrik dengan anak-anak yang ditinggalkan di rumah bersama keluarga besar atau tanpa pengawasan sama sekali. Pemisahan ini menjadi awal bagi dinamika keluarga dan masyarakat termasuk bagi munculnya permasalahan sosial yang diakibatkannya. Retaknya relasi sosial antara pekerja dan keluarganya, kurangnya kesempatan anak-anak dalam meniru model peranan orang tua, dan munculnya alinasi atau keterasingan pekerja dalam kehidupan masyarakatnya adalah beberapa contoh masalah sosial yang timbul akibat industrialisasi (Johnson 1984 & Kartono 1994, dalam Suharto t.th).

Apabila ditelaah lebih lanjut sebenarnya biaya yang dibutuhkan menjadi pekerja migran pun tidak sedikit. Beberapa diantaranya memang biaya yang tidak terlihat secara nyata (*hidden cost*), misalnya biaya yang diberikan kepada calo-calo tenaga kerja agar mereka dapat bekerja di tempat tujuannya. Mulyanto, *et.al.* (2009) menunjukkan kondisi calon tenaga kerja migran yang harus kehilangan tanah warisannya karena membutuhkan biaya untuk bekerja.

Namun demikian, pola relasi antara kaum migran dengan keluarga di desa asalnya pun tidak sedikit mampu mendukung kepergian kaum migran. Pada perkembangannya, hubungan antara pekerja migran dengan desa masih terjaga dengan baik. Nugroho (2006:35, mengutip Connel dalam Effendi 1989) melihat bahwa hubungan migran dengan desa asal di negara-negara berkembang dikenal sangat erat, sehingga menjadi salah satu ciri fenomena migrasi di negara berkembang. Hubungan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung, antara lain

diwujudkan dengan pengiriman uang, barang-barang, bahkan ide-ide pembangunan di daerah asal. Dona, *et.al.*(2008;71) menunjukkan kiriman dari kota menjadi sumber penghasilan utama keluarga di desa ketika pertanian tidak dapat diandalkan.

Desa setidaknya masih bisa dianggap sebagai 'jaring pengaman' ketika para migran mengalami krisis atau kekurangan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Studi Dona, *et.al.* (2008:68-69) menunjukkan peran desa bagi para pekerja migran, antara lain: 1) desa menjadi tempat menitipkan anak ketika para pekerja migran pergi bekerja di perkotaan. Dari aspek ekonomi, menitipkan anak kepada keluarganya dianggap lebih murah dibanding menitipkan di tempat penitipan anak; 2) desa sebagai tempat tinggal sementara ketika pekerja migran terkena PHK; 3) sebagai tempat pulang kampung, pulang kampung merupakan mekanisme mempertahankan hubungan sosial dengan komuniti (keluarga dan teman) di desa, sekaligus mempertahankan hubungan ekonomi melalui kiriman kepada keluarga di desa; 4) pasokan makanan dari kampung; 5) dukungan finansial dari keluarga (orang tua) di desa saat belum/tidak memiliki pekerjaan di kota.

Berdasarkan pemaparan hal tersebut diatas, setidaknya dapat diperoleh keterkaitan antara peningkatan jumlah tenaga kerja migran maupun pola-pola migrasi yang terjadi dengan upaya-upaya yang dijalankan masing-masing kota tujuan untuk mengantisipasi dampak negatif yang dapat muncul terkait dengan migrasi tersebut. Salah satu yang dilakukan adalah melalui penetapan kebijakan "kota tertutup". Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkecil jumlah pendatang ke kota. Namun, ada pula anggapan bahwa kebijakan tersebut kurang efektif dijalankan karena melarang kedatangan seseorang ke suatu tempat merupakan pelanggaran hak azasi manusia. Di sisi lain, peningkatan jumlah migran pun berdampak pada relasi-relasi yang terjadi dalam rumah tangga maupun komuniti tempat tinggal asal tenaga migran tersebut. Dampak positif maupun negatif yang dapat muncul pun tergantung pada sikap yang diperlihatkan pelaku migran dalam kehidupan di daerah asal tersebut.

Referensi

- Anonim. 2009. "Alternatif Mencegah Arus Migrasi ke Kota Besar" dalam [<http://www.depkominfo.go.id/2009/04/27/alternatif-mencegah-arus-migrasi-ke-kota-besar/>].
- BNP2TKI. 2007. Daftar Nama PPTKIS. Jakarta: BNP2TKI, diakses dalam [<http://bnp2tki.go.id/content/view/121/257/>].
- Deshingkar, Priya. 2004. "Understanding the Implications of Migration for Pro-poor Agricultural Growth" paper prepared for the DAC POVNET Agriculture Task Group Meeting, Helsinki, 17 – 18 June, 2004.
- Hayami, Yujiro dan Masako Kikuchi, 1987. Dilema Ekonomi Desa. Jakarta: Yayasan Obor
- ILO. T.th. "Protection & Prevention for Indonesian Migrant Workers". Jakarta: ILO Jakarta Office.
- Kutanegara, P.M. 2002. "Sumbangan dan Solidaritas Sosial: Jerat Kultural Masyarakat Pedesaan Jawa". Paper Center for Population and Policy Studies, S. 312, June 20, 2002. Gadjah Mada University.
- Mulyanto, Dede, *et.al.* 2009. Kapitalisasi dalam Penghidupan Perdesaan. Bandung: AKATIGA.
- Naekma dan Pageh, I Wayan. 2009. "Penempatan dan Perlindungan", diakses dalam [<http://bnp2tki.go.id/content/view/975/85/>].
- Noveria, M. 2009. "Kependudukan dan Fenomena Urbanisasi Dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman : Agenda Kebijakan Tata Kelola dan Pengendaliannya." Makalah dalam Seri Diskusi Nasional Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II tahun 2009, Jakarta , 26-27 Februari 2009.
- Palupi, Sri. 2004. "Penggusuran dan Krisis Orientasi Kota" dalam [<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0312/04/opini/716690.htm>].
- Romdiati, H. dan M. Noveria. 2004. "Mobilitas Penduduk Antar Daerah dalam Rangka Tertib Pengendalian Migrasi Masuk ke DKI Jakarta". Makalah Disampaikan pada Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Tentang Urbanisasi. Jakarta, 5 Agustus 2004.
- Setiadi. 2002. "Is International Migration A Way Out Of Economic Crisis?" dalam Jurnal Populasi Bulan Desember 2002.
- Setiadi dan Sukamdi. 2002. Migrasi Internasional: Strategi Kelangsungan Hidup pada Era Krisis Ekonomi [Versi lengkap paper ini akan terbit dalam Jurnal Populasi Bulan Desember 2002 dengan judul "Is International Migration A Way Out Of Economic Crisis?"]
- Suharto, Edi. T.th. "Pekerjaan Sosial Industri", diakses dalam [http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_26.htm].

- Supriatna, Y. 2008. "Bang Ali di Mata Perencana Kota" dalam [<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/05/22/01182638/bang.ali.di.mata.perencana.kota>].
- Syahyuti. 2008. Peran Modal Sosial (Social Capital) dalam Perdagangan Hasil Pertanian." Dalam Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi Departemen Pertanian, Vol.26 No.1, Juli 2008: 32-43.
- Tarigan, Herlina. 2004. "Proses Adaptasi Migran Sirkuler : Kasus Migran Asal Komunitas Perkebunan Teh Rakyat Cianjur, Jawa Barat". Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Pertanian Bogor (ICASERD WORKING PAPER No. 47)
- Thieme, Susan (eds.). 2006. *Social Networks and Migration: Far West Nepalese Labour Migrants in Delhi*. Zurich: University of Zurich and National Centre for Competence in Research North-South.
- Tjiptoherijanto, P. 2000. "Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi." Makalah dalam Simposium Dua Hari Kantor Mentrans dan Kependudukan/BAKMP di Jakarta tanggal 25-26 Mei 2000.
- Togi. t.th. Pergeseran Pola Relasi Gender Keluarga Migran di Indonesia (dalam http://www.depsos.go.id/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=114).
- Widyaningrum, N. 2009. "Kota Untuk Siapa?" dalam [<http://akatiga.org/index.php/artikeldanopini/kemiskinan/110-kota-untuk-siapa>].
- Wirawan, Ida Bagus. 2006. Migrasi Sirkuler Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri: Studi Tentang Proses Pengambilan Keputusan Bermigrasi oleh Wanita Pedesaan di Jawa. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya [tidak dipublikasi]